



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penataan kelembagaan Pemerintah Daerah Kota Cirebon, perlu adanya pedoman hubungan kerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pedoman hubungan kerja Perangkat Daerah tersebut diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5, Seri D)
12. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA CIREBON TENTANG PEDOMAN TATA HUBUNGAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI KOTA CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Cirebon.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon;
8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Wali Kota Cirebon.
10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Cirebon.

11. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan dan Asisten Administrasi Umum.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon.
13. Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.
14. Konsultatif adalah hubungan kerja yang bersifat penyalarsan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
15. Kolegial adalah hubungan kerja yang bersifat penyatupaduan dan penyerasian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
16. Fungsional adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar instansi sektor berlainan yang memiliki keterkaitan fungsi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
17. Struktural adalah hubungan kerja yang dilaksanakan dalam rentang kendali kepada bawahannya sesuai dengan struktur organisasi dalam rangka optimalisasi pencapaian hasil kerja.
18. Koordinatif adalah hubungan kerja yang dilaksanakan antar instansi berdasarkan keterkaitan instansi satu sektor dalam rangka optimalisasian pencapaian hasil kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata hubungan kerja dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja dalam perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk optimalisasi pencapaian hasil kerja.
- (2) Tata hubungan Kerja bertujuan untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan guna meningkatkan optimalisasi, efesiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Tata Hubungan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. Prinsip Hubungan Kerja;
- b. Pola Hubungan Kerja;
- c. Pelaksanaan Hubungan Kerja;
- d. Peran Perangkat Daerah dan Staf Ahli Dalam Tata Hubungan Kerja;
- e. Tata Hubungan Kerja Antara Perangkat Daerah Lainnya dengan Kecamatan; dan
- f. Tata Hubungan Kerja Antara Kecamatan Dengan Kelurahan;

Pasal 4

Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenang.

BAB IV

PRINSIP HUBUNGAN KERJA

Pasal 5

Tata hubungan kerja mengandung prinsip:

- a. saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
- b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah dan Staf Ahli;
- c. saling memberi manfaat; dan
- d. saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

BAB V

POLA HUBUNGAN KERJA

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas, fungsi, serta wewenang Perangkat Daerah dan Staf Ahli dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
 - a. konsultatif;
 - b. kolegial;
 - c. fungsional;
 - d. struktural; dan
 - e. koordinatif.
- (2) Di dalam melaksanakan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Staf Ahli mempunyai peran sebagai berikut:
 - a. konsultan kebijakan;
 - b. konsultan teknis;
 - c. konsultan ahli;
 - d. nara sumber;

- e. sumber data; dan
- f. mitra kerja.

- (3) Pelaksanaan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan aspek keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.

Pasal 7

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenangnya.
- (2) Hubungan kerja konsultatif dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. perencanaan;
 - b. perumusan kebijakan;
 - c. pemutakhiran data; dan
 - d. penyelesaian tugas dan fungsi.
- (3) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam kondisi tertentu dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 8

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk :
 - a. menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja;
 - b. mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol dominasi hubungan struktural yang umumnya cenderung terpusat.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah dan tanggung jawab bersama.

Pasal 9

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memberikan peran substansial secara fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk mengembangkan kepemimpinan secara berjenjang dengan tetap melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya secara bertanggungjawab.

- (2) Hubungan kerja struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan kerja sama yang terpadu, harmonis, selaras, komprehensif, dan tidak mementingkan kepentingan wewenangnya.

Pasal 11

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja secara struktural dengan menumbuhkembangkan semangat kolegal yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan wewenang.
- (2) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan sarana yang menjamin kelancaran, kemudahan, efektifitas, dan efisiensi.
- (3) Hubungan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansial, dan menjamin keselarasan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah.

Pasal 12

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:

- a. perumusan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan bagi Perangkat Daerah;
- b. perumusan rencana strategis Perangkat Daerah;
- c. integrasi dan sinkronisasi program Perangkat Daerah;
- d. pemecahan masalah yang menyangkut tugas dan fungsi yang bersifat lintas Perangkat Daerah;
- e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai Perangkat Daerah terkait untuk menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
- f. pembentukan badan/lembaga yang diperlukan untuk menangani fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
- g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 13

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah membantu Wali Kota dalam menyusun kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, serta melaksanakan pembinaan administrasi dan aparatur pemerintah daerah.
- b. Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekretaris Daerah dalam merumuskan kebijakan dan

mengoordinasikan, membina, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan sesuai bidangnya sebagai berikut:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan Urusan Pemerintahan bidang :
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) sosial;
 - d) ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
 - e) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g) kepemudaan dan olah raga;
 - h) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - i) pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j) perpustakaan;
 - k) pemerintahan; dan
 - l) hukum dan perundang-undangan.
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan mengoordinasikan Urusan Pemerintahan bidang :
 - a) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - b) perumahan dan kawasan permukiman;
 - c) tenaga kerja;
 - d) pangan;
 - e) pertanahan;
 - f) lingkungan hidup;
 - g) perhubungan;
 - h) komunikasi dan informatika;
 - i) koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j) penanaman modal;
 - k) statistik;
 - l) persandian;
 - m) kebudayaan;
 - n) kelautan dan perikanan;
 - o) pariwisata;
 - p) pertanian;
 - q) perdagangan;
 - r) perindustrian;
 - s) perencanaan pembangunan daerah;
 - t) administrasi pengadaan barang dan jasa; dan
 - u) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. Asisten Administrasi Umum mengoordinasikan Urusan Pemerintahan bidang :
 - a) kearsipan;
 - b) kepegawaian dan pendidikan pelatihan;
 - c) barang milik daerah;
 - d) pengelolaan keuangan daerah;
 - e) kelembagaan;
 - f) pendayagunaan dan kinerja aparatur;
 - g) ketatalaksanaan;
 - h) pelayanan publik; dan
 - i) reformasi birokrasi.

- c. Dinas, Satuan dan Kantor mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- d. Badan mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 14

Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilaksanakan secara:

- a. Periodik, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan secara berkala; dan
- b. Insidental, yaitu hubungan kerja koordinatif yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

- (1) Untuk terselenggaranya hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 seluruh Perangkat Daerah dapat mengembangkan sistem informasi terpadu, terbuka, dan dapat diakses oleh publik.
- (2) Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.

BAB VI

PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Wali Kota selaku Kepala Daerah melakukan:
 - a. Hubungan kerja struktural dengan Perangkat Daerah dan Staf Ahli;
 - b. Hubungan kerja koordinatif dengan DPRD;
 - c. Hubungan kerja koordinatif dengan Instansi Vertikal
- (3) Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota, Wali Kota dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai satuan kerja untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan karakteristik dan kemampuan daerah yang secara umum yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;

- c. Inspektorat;
 - d. Dinas;
 - e. Badan; dan
 - f. Kecamatan
- (5) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Wali Kota menjalin koordinasi dan hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah dalam upaya pelaksanaan kebijakan, norma standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pengurusan penyelenggaraan urusan pemerintahan
 - (6) Perangkat Daerah di luar Sekretariat Daerah melaksanakan urusan pemerintahan wajib dan pilihan sesuai fungsi dan bidang tugasnya;
 - (7) Staf Ahli melaksanakan pola hubungan kerja konsultatif dan koordinatif dengan Perangkat Daerah;
 - (8) Matrik tata hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Bentuk dan Waktu Koordinasi

Pasal 17

- (1) Koordinasi dilakukan dalam bentuk :
 - a. Pertemuan/Rapat Koordinasi;
 - b. Penyampaian atau permintaan data, informasi dan laporan/telaah
 - c. Konsultasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung atau melalui media elektronik;
- (3) Koordinasi dilaksanakan secara :
 - a. Periodik, merupakan koordinasi yang dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara berkala.
 - b. Insidental, merupakan koordinasi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Rapat Koordinasi Tingkat Kota

Pasal 18

Pelaksanaan rapat koordinasi tingkat kota untuk membahas permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Pasal 19

- (1) Sebelum dilaksanakan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, masing-masing Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan pra rapat koordinasi

paling lambat 5 (lima) hari sebelum dilaksanakannya rapat koordinasi.

- (2) Pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membahas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di lingkup koordinasi masing-masing Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil pembahasan pra rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dan atau dibahas dalam rapat koordinasi tingkat kota.

Bagian Keempat

Hubungan Kerja dan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan DPRD

Pasal 20

- (1) Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Pemerintah Daerah Kota dan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. rapat konsultasi Pemerintah Daerah dengan DPRD; dan
 - d. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kelima

Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan koordinasi hierarki dengan Perangkat Daerah dan Staf Ahli Wali Kota.
- (2) Dalam mengoordinasikan Perangkat Daerah, Wali Kota dibantu oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Setiap Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) baik lingkup Perangkat Daerah maupun antar Perangkat Daerah.
- (5) Setiap Kepala Perangkat Daerah serta unsur organisasi dibawahnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dimaksudkan

sebagai bentuk pengoordinasian dan pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas-tugas kedinasan masing-masing Perangkat Daerah.

- (7) Pengoordinasian dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan melalui Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Sekretariat Daerah mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Asisten Sekretariat Daerah melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sesuai bidangnya.
- (3) Bagian membantu Asisten Sekretariat Daerah melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan fungsi dan bidang tugasnya.

Pasal 23

Sekretariat DPRD melaksanakan koordinasi secara administratif dengan Sekretariat Daerah dalam perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam pelaksanaan tugasnya melaksanakan koordinasi fungsional maupun instansional dengan perangkat daerah dan instansi vertikal.

Pasal 25

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan serta Penelitian dan Pengembangan, melaksanakan hubungan kerja yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, dan koordinatif dengan Perangkat Daerah.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Badan Keuangan Daerah sebagai pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang pengelolaan keuangan daerah, melaksanakan hubungan kerja

yang bersifat konsultatif, kolegial, fungsional, dan koordinatif dengan Perangkat Daerah.

- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN PERANGKAT DAERAH DALAM TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 27

- (1) Konsultan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah peran Sekretariat Daerah/Staf Ahli/Analisis Kebijakan yang berwenang memberikan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan pemerintah daerah.
- (2) Konsultan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b adalah peran Perangkat Daerah/pejabat yang karena tugas dan fungsinya berwenang memberikan pertimbangan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Konsultan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah peran Perangkat Daerah/pejabat yang karena keahliannya berwenang memberikan pertimbangan dalam bidang keahlian/profesinya.
- (4) Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah peran Perangkat Daerah/Staf Ahli/pejabat yang berwenang memberikan penjelasan/saran/pendapat serta analisis terhadap informasi/data sesuai dengan bidang tugas atau keahliannya.
- (5) Sumber data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e adalah peran Perangkat Daerah/pejabat yang berwenang memberikan informasi/data sesuai dengan bidang tugas dan fungsi/profesinya.
- (6) Mitra kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah peran Perangkat Daerah/pejabat yang melakukan kegiatan bersama dengan tujuan terlaksananya kepentingan bersama.

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar Perangkat Daerah/Staf Ahli/pejabat dalam penyelenggaraan hubungan kerja, Sekretaris Daerah melakukan koordinasi untuk penyelesaian.
- (2) Koordinasi penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara cepat, transparan, serta adil dan tidak memihak.

BAB VIII
TATA HUBUNGAN KERJA
ANTARA PERANGKAT DAERAH LAINNYA DENGAN
KECAMATAN

Pasal 29

- (1) Hubungan kerja Kecamatan dengan Perangkat Daerah lainnya bersifat:
 - a. koordinatif; dan
 - b. konsultatif.
- (2) Camat mempunyai fungsi mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas/Badan di Kecamatan yang dilaksanakan oleh UPT/UPT/sebutan lainnya.
- (3) Hubungan kerja koordinatif dan konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan, memberikan informasi secara tertulis rencana pelaksanaan program dan kegiatannya paling lambat pada bulan ketiga dimulainya tahun anggaran;
 - b. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan memberikan akses bagi Kecamatan untuk memberikan saran, masukan, dan bahan pertimbangan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatannya;
 - c. Perangkat Daerah selain Kecamatan yang mempunyai program dan kegiatan yang ada di wilayah Kecamatan memfasilitasi dialog, pertemuan, dan forum koordinasi antara Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.
 - d. Kecamatan dapat memfasilitasi dialog, pertemuan dan forum koordinasi antara Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Kecamatan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatannya.

BAB IX
TATA HUBUNGAN KERJA
ANTARA KECAMATAN DENGAN KELURAHAN

Pasal 30

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat, dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Hubungan kerja Kecamatan dengan Kelurahan bersifat struktural dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan, serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kelurahan.

Pasal 31

- (1) Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. melaksanakan pembinaan administrasi tata pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan penerapan dan penegakan peraturan daerah;
 - c. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Lurah dan perangkat Kelurahan;
 - d. melaksanakan pembinaan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. melaksanakan pembinaan dalam hal pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
 - f. melaksanakan pembinaan penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; dan
 - g. melaksanakan pembinaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Bagan hubungan kerja dan pola koordinasi Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penjabaran pelaksanaan hubungan kerja dan pola koordinasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Wali Kota Peraturan ini.
- (3) Peraturan ini berlaku bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Hubungan Kerja Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 22 Juni 2020

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 24 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

NANIN HAYANI ADAM

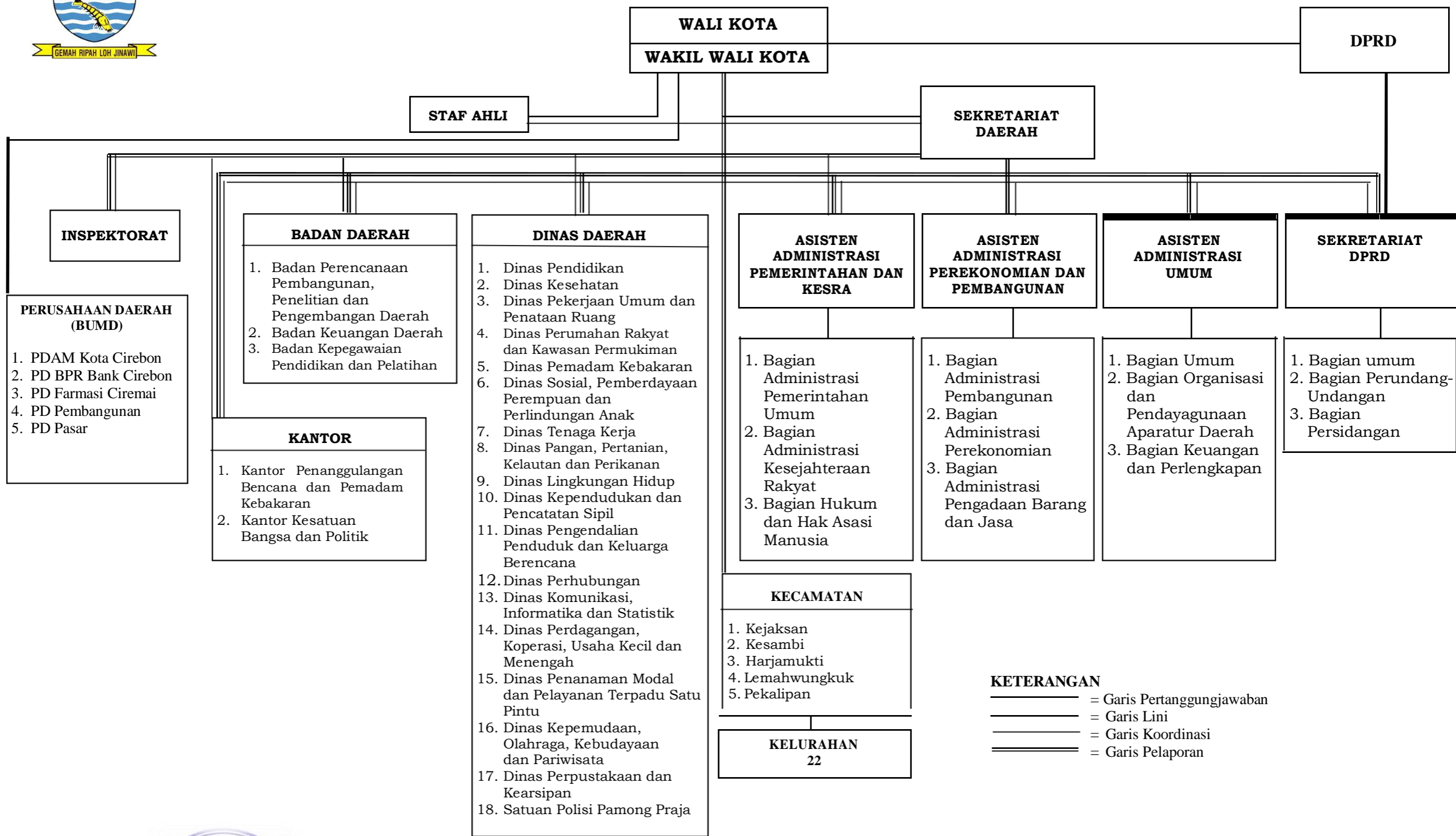
BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19621001 199703 1 003



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
 BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2016**



KETERANGAN
 ————— = Garis Pertanggungjawaban
 ————— = Garis Lini
 ————— = Garis Koordinasi
 = Garis Pelaporan

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA,

 CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19621001 199703 1 003

WALI KOTA CIREBON,
 ttd,
 NASHRUDIN AZIS

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		Menyelenggarakan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan di bidang yang menjadi kewenangannya.	Perangkat Daerah terkait, dan Bagian Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra.		V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda Inpektorat	V V		V	V	V
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Merumuskan kebijakan teknis kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan	Bagian Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra. Perangkat Daerah		V	V	V	V
		Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan	Perangkat Daerah terkait, dan Bagian Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra. B4D, BKD			V	V	V
		Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan perekonomian dan pembangunan	Perangkat Daerah terkait, dan Bagian Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan.		V	V	V	V
		pengoordinasian penyusunan pembinaan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan	Perangkat Daerah terkait, dan Bagian Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan.		V	V	V	V
		Menyelenggarakan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan di bidang perekonomian dan pembangunan	Perangkat Daerah terkait, dan Bagian Lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan.		V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda Inpektorat	V V		V	V	V
4	Asisten Administrasi Umum	Merumuskan kebijakan teknis kegiatan di bidang administrasi umum	Bagian Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra. Perangkat Daerah		V	V	V	V
		Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan di bidang administrasi umum	Perangkat Daerah terkait, dan Bagian Lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesra. B4D, BKD			V	V	V
		Menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan administrasi umum	Perangkat Daerah terkait, dan Bagian Lingkup Asisten Administrasi Umum		V	V	V	V
		Mengkoordinasikan penyusunan pembinaan kegiatan di bidang administrasi umum	Perangkat Daerah terkait, dan Bagian Lingkup Asisten Administrasi Umum		V	V	V	V
		Menyelenggarakan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan kegiatan di bidang administrasi umum	Perangkat Daerah terkait, dan Bagian Lingkup Asisten Administrasi Umum		V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda Inpektorat	V V		V	V	V
5	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Menyusun perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyuiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Melakukan fasilitasi dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Asisten terkait Inpektorat	V V			V	V
6	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Menyusun perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Melakukan fasilitasi dalam lingkup bidangnya	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan;	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Asisten terkait Inpektorat	V V		V	V	V
7	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Menyusun perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah lingkup Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Melakukan fasilitasi dalam lingkup bidangnya	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Asisten terkait Inpektorat	V V		V	V	V
8	Bagian Administrasi Pembangunan	Menyusun perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pembangunan	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pembangunan.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pembangunan.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Bagian Administrasi Pembangunan.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan fasilitasi dalam lingkup bidang tugasnya.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pembangunan.	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Asisten terkait	V			V	
			Inpektorat	V		V		V
9	Bagian Administrasi Perekonomian	Menyusun perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pembangunan.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Perekonomian.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Bagian Administrasi Perekonomian.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan fasilitasi dalam lingkup bidang tugasnya.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Perekonomian.	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Asisten terkait	V			V	
			Inpektorat	V		V		V
10	Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	Menyusun perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan fasilitasi dalam lingkup bidang tugasnya.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Administrasi	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Asisten terkait	V			V	

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		Pengadaan Barang dan Jasa.	Inpektorat	V		V		V
11	Bagian Umum	Menyusun perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah lingkup Bagian Umum.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Umum.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bagian Umum.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Bagian Umum.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Menyelenggarakan fasilitasi dalam lingkup bidang tugasnya.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Umum.	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Asisten terkait	V			V	
			Inpektorat	V		V		V
12	Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur	Menyusun perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah lingkup Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan fasilitasi dalam lingkup bidang tugasnya.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan.	Perangkat Daerah terkait		V	V		V
		Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur.	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Asisten terkait	V			V	
			Inpektorat	V		V		V
13	Bagian Keuangan dan Perlengkapan	Menyusun perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah lingkup Bagian Keuangan dan Perlengkapan.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Menyiapkan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Keuangan dan Perlengkapan.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		Menyelenggarakan fasilitasi dalam lingkup bidang tugasnya.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian penyelenggaraan pemerintahan.	Asisten Lingkup Setda		V	V		V
		Menyelenggarakan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah lingkup Bagian Keuangan dan Perlengkapan.	Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, Asisten terkait	V			V	
			Inpektorat	V		V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	SEKRETARIAT DPRD							
1	SEKRETARIS DPRD	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD	BP4D		V			V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD	Asisten Terkait	V			V	V
		penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD	Inspektorat		V		V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D			V	V	V
			BKD			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
2	BAGIAN UMUM	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD lingkup Bagian Umum	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD lingkup Bagian Umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D			V	V	V
			BKD			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bagian Umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D			V	V	V
			BKD			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bagian Umum	Asisten Terkait	V			V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD lingkup Bagian Umum	Asisten Terkait	V			V	V
3	BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD lingkup Bagian Perundang-Undangan	BP4D		V	V		V
			Asisten Terkait	V			V	V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD lingkup Bagian Perundang-Undangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaksanaan tugas pokok Bagian Perundang-Undangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bagian Perundang-Undangan	DKIS		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD lingkup Bagian Perundang-Undangan	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V	V	V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
4	BAGIAN PERSIDANGAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Sekretariat DPRD lingkup Bagian Persidangan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD lingkup Bagian Persidangan	Asisten Terkait	V			V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bagian Persidangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bagian Persidangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD lingkup Bagian Persidangan	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V	V	V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS KESEHATAN							
1	KEPALA DINAS KESEHATAN	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait BP4D	V		V	V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kesehatan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kesehatan Masyarakat	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
4	BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
5	BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS PENDIDIKAN							
1	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait BP4D	V		V	V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PEMBINAAN PAUD	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pembinaan PAUD	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pembinaan PAUD	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan PAUD	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pembinaan PAUD	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan PAUD	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pembinaan PAUD	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
4	BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Asisten Terkait	V		V	V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
5	BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pembinaan Ketenagaan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pembinaan Ketenagaan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pembinaan Ketenagaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Ketenagaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pembinaan Ketenagaan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS TENAGA KERJA							
1	KEPALA DINAS TENAGA KERJA	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidangnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
					V	V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait BP4D	V			V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidangnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
4	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Hubungan Industrial	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Hubungan Industrial	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Hubungan Industrial	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Hubungan Industrial	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Hubungan Industrial	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Hubungan Industrial	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
1	KEPALA DINAS PUPR	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V	V	V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan	Asisten Terkait	V			V	V
		penyelenggaraan tugas Dinas	BP4D		V	V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG SUMBER DAYA AIR	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Sumber Daya Air	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Sumber Daya Air	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Sumber Daya Air	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Sumber Daya Air	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Sumber Daya Air	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Sumber Daya Air	Asisten Terkait	V		V	V	V
			BKD			V	V	V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
4	BIDANG BINA MARGA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Bina Marga	BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Bina Marga	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Bina Marga	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Bina Marga	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Bina Marga	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Bina Marga	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
5	BIDANG CIPTA KARYA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Cipta Karya	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Cipta Karya	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Cipta Karya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Cipta Karya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Cipta Karya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Cipta Karya	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
5	BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS PENATAAN RUANG DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
1	KEPALA DINAS PUPR	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V		V	V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D			V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V		V
		BKPPD			V		V	
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PERUMAHAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perumahan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perumahan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Perumahan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perumahan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perumahan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perumahan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD			V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
4	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Kawasan Permukiman	BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2		4	5	6	7	8	9	
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kawasan Permukiman	Asisten Terkait	V		V	V	V	
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V	
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V	
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kawasan Permukiman	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V	
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V	
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kawasan Permukiman	Asisten Terkait	V	V	V	V	V	
			BKD		V	V		V	
			BP4D			V	V		V
			BKPPD			V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait	V			V	V
			BKPPD			V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D			V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V		V
			BKPPD			V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG SOSIAL	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Sosial	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Sosial	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Sosial	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Sosial	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Sosial	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Sosial	Asisten Terkait	V		V	V	V
			BKD			V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
4	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan	BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Perempuan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pemberdayaan Perempuan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
5	BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perlindungan Anak	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perlindungan Anak	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Perlindungan Anak	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perlindungan Anak	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perlindungan Anak	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perlindungan Anak	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
6	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang PEmberdayaan Masyarakat	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang PEmberdayaan Masyarakat	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang PEmberdayaan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang PEmberdayaan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang PEmberdayaan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang PEmberdayaan Masyarakat	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS PANGAN, PERTANIAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD		V	V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D			V	V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
		BKPPD			V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V			V	V
3	BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Asisten Terkait	V			V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
			BKPPD		V	V		V
4	BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
5	BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pertanian dan Peternakan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pertanian dan Peternakan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pertanian dan Peternakan	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
6	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Kelautan dan Perikanan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kelautan dan Perikanan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kelautan dan Perikanan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kelautan dan Perikanan	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidangnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait	V			V	V
		operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	BKPPD		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan	Asisten Terkait	V			V	V
		penyelenggaraan tugas Dinas	BP4D		V	V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V		V
			BKPPD			V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG TATA LINGKUNGAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Tata Lingkungan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Tata Lingkungan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Tata Lingkungan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Tata Lingkungan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Tata Lingkungan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidangnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Tata Lingkungan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
4	BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BERBAHAYA DAN BERACUN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
5	BIDANG PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
6	BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2		4	5	6	7	8	9	
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V	
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V	
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Asisten Terkait	V	V	V	V	V	
			BKD		V	V		V	
			BP4D			V	V		V
			BKPPD			V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D		V	V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
4	BIDANG KELUARGA BERENCANA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Keluarga Berencana	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Keluarga Berencana	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Keluarga Berencana	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Keluarga Berencana	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keluarga Berencana	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Keluarga Berencana	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
5	BIDANG KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait	V			V	V
			BKPPD		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D		V	V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PELAYANAN DAN PENDAFTARAN PENDUDUK	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA					
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF	
1	2		4	5	6	7	8	9	
4	BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	BP4D		V	V		V	
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Asisten Terkait	V		V	V	V	
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah Terkait			V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah Terkait			V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Perangkat Daerah Terkait			V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait			V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Asisten Terkait	V	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V	
			BP4D			V	V		V
			BKPPD			V	V		V
5	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	BP4D		V	V		V	
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Asisten Terkait	V		V	V	V	
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Perangkat Daerah Terkait			V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Perangkat Daerah Terkait			V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Perangkat Daerah Terkait			V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait			V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	Asisten Terkait	V	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V	
			BP4D			V	V		V
			BKPPD			V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS PERHUBUNGAN							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V	V	V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
						V	V	V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait BP4D	V			V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG LALU LINTAS	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Lalu Lintas	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Lalu Lintas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Lalu Lintas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Lalu Lintas	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD			V	V	V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
4	BIDANG ANGKUTAN DAN MULTIMODA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda	Asisten Terkait	V		V	V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Angkutan dan Multimoda	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Angkutan dan Multimoda	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
5	BIDANG KESELAMATAN DAN TEHNIK SARANA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	inspektorat		V	V		V
			Asisten Terkait	V			V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait BP4D	V		V	V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
4	BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
5	BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
6	BIDANG LAYANAN E-GOVERNMENT	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Layanan E-Government	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Layanan E-Government	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Layanan E-Government	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Layanan E-Government	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Layanan E-Government	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Layanan E-Government	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
7	BIDANG STATISTIK SEKTORAL DAN PERSANDIAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Statistik Sektoral dan Persandian	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
						V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait BP4D	V		V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V		V
			BKPPD			V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PERDAGANGAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perdagangan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perdagangan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Perdagangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perdagangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perdagangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perdagangan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD			V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
4	BIDANG KEMETROLOGIAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Kemetrolgian	BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kemetrolagian	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Kemetrolagian	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kemetrolagian	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kemetrolagian	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kemetrolagian	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
5	BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
6	BIDANG PERINDUSTRIAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perindustrian	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perindustrian	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Perindustrian	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perindustrian	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perindustrian	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perindustrian	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait BP4D	V			V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BKPPD			V	V	V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V			V	V
3	BIDANG PENANAMAN MODAL	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Penanaman Modal	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Penanaman Modal	Asisten Terkait	V			V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Penanaman Modal	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penanaman Modal	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penanaman Modal	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Penanaman Modal	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V		V
4	BIDANG DATA, INFORMASI DAN PEGADUAN LAYANAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Data, Informasi dan Pengaduan Layanan	BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Data, Informasi dan Pengaduan Layanan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Data, Informasi dan Pengaduan Layanan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Data, Informasi dan Pengaduan Layanan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Data, Informasi dan Pengaduan Layanan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Data, Informasi dan Pengaduan Layanan	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
5	BIDANG PELAYANAN TERPADU A	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Terpadu A	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelayanan Terpadu A	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Terpadu A	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan Terpadu A	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Terpadu A	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Terpadu A	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
	BIDANG PELAYANAN TERPADU B	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pelayanan Terpadu B	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pelayanan Terpadu B	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Terpadu B	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pelayanan Terpadu B	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pelayanan Terpadu B	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pelayanan Terpadu B	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V	V	V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait	V			V	V
			BKPPD			V	V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D			V	V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D			V	V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V	V	V
			BKPPD			V	V	V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V			V	V
3	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Kepemudaan dan Olahraga	BP4D			V	V	V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Asisten Terkait	V			V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD			V	V	V
			BP4D			V	V	V
			BKPPD			V	V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
4	BIDANG KEBUDAYAAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Kebudayaan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Kebudayaan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Kebudayaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Kebudayaan	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
5	BIDANG PARIWISATA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pariwisata	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pariwisata	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pariwisata	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pariwisata	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pariwisata	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pariwisata	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D			V		V
			BKPPD			V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait BP4D	V			V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD			V		V
			BKPPD			V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V			V	V
3	BIDANG LAYANAN, PENGOLAHAN DAN PELESTARIAN BAHAN PERPUSTAKAAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Layanan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Layanan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Layanan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Layanan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Layanan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Layanan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD			V		V
			BP4D			V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
			BKPPD		V	V		V
4	BIDANG PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PEMBUDAYAAN KECEMERLANGAN MEMBACA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
5	BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
6	BIDANG PENGELOLAAN ARSIP	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Arsip	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengelolaan Arsip	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Arsip	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengelolaan Arsip	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengelolaan Arsip	Perangkat Daerah Terkait			V	V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang	BKD		V	V		V
		Pengelolaan Arsip	BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN							
1	KEPALA DINAS	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Dinas	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	Inspektorat		V	V		V
			Asisten Terkait	V			V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
2	SEKRETARIS DINAS	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait BKPPD	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Dinas	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas	Asisten Terkait BP4D	V		V	V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kebakaran	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kebakaran	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kebakaran	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kebakaran	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kebakaran	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Sarana dan Prasarana Kebakaran	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
4	BIDANG PENGEDALIAN, PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN KEBAKARAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pengendalian, Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							
1	KEPALA SATUAN	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Satpol PP	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoorSatpol PPian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP	Inspektorat		V	V		V
			Asisten Terkait	V			V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
2	SEKRETARIS Satpol PP	penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoorSatpol PPian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Satpol PP	BP4D		V	V		V
		pengoorSatpol PPian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang tenaga kerja	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoorSatpol PPian penyelenggaraan tugas Satpol PP	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Satpol PP	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoorSatpol PPian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Satpol PP	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D		V	V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satpol PP lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-Undangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoorSatpol PPian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoorSatpol PPian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-Undangan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Penegakan Perundang-Undangan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
4	BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satpol PP lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoorSatpol PPian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoorSatpol PPian pelaksanaan tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V
5	BIDANG PEMBINAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Satpol PP lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Satpol PP lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoorSatpol PPian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoorSatpol PPian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
			Asisten Terkait	V	V	V	V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH							
1	KEPALA BADAN	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Badan	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoorBadanian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidangnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan	Asisten Terkait	V			V	V
2	SEKRETARIS BADAN	penyiapan bahan penyusunan rencana kerja	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Badan	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoorBadanian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Badan	Asisten Terkait	V			V	V
			BP4D		V	V		V
			Asisten Terkait	V			V	V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	BKD					
			BKPPD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidangnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Asisten Terkait	V	V	V	V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
4	BIDANG PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA, EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
5	BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
6	BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perencanaan Pemerintahan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perencanaan Pemerintahan	Asisten Terkait	V	V	V	V	V
7	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Asisten Terkait	V			V	V
7	BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKOTAAN DAN INOVSAI DAERAH	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah	Asisten Terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah	Asisten Terkait	V	V	V	V	V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	BADAN KEUANGAN DAERAH							
1	KEPALA BADAN	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Badan	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan	Asisten terkait	V			V	V
		pengoorBadanian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan	Asisten terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan	Inspektorat		V	V		V
			Asisten terkait	V			V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan	BKPPD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
2	SEKRETARIS BADAN	penyiapan bahan penyusunan rencana kerja	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Badan	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan	Asisten terkait	V			V	V
		pengoorBadanian penyiapan bahan penyusunan laporan	Asisten terkait	V			V	V
		penyelenggaraan tugas Badan	BP4D		V	V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten terkait	V			V	V
			BKPPD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten terkait	V		V	V	V
3	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAEARAH I	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I	Asisten terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I	Asisten terkait	V	V	V	V	V
			BKPPD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
4	BIDANG PENDAPATAN ASLI DAEARAH II	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II	Asisten terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II	Asisten terkait	V	V	V	V	V
			BKPPD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
5	BIDANG PENGANGGARAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Penganggaran	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Penganggaran	Asisten terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penganggaran	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Penganggaran	Asisten terkait	V	V	V	V	V
			BKPPD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
6	BIDANG PERBENDAHARAAN	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Perbendaharaan	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Perbendaharaan	Asisten terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perbendaharaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Perbendaharaan	Asisten terkait	V	V	V	V	V
			BKPPD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
7	BIDANG AKUNTANSI	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Akuntansi	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Akuntansi	Asisten terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Akuntansi	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Akuntansi	Asisten terkait	V	V	V	V	V
			BKPPD		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
			BP4D		V	V		V
7	BIDANG BARANG KEKAYAAN MILIK DAERAH	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Barang Kekayaan Milik Daerah	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Barang Kekayaan Milik Daerah	Asisten terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Kekayaan Milik Daerah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Barang Kekayaan Milik Daerah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Kekayaan Milik Daerah	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Barang Kekayaan Milik Daerah	Asisten terkait	V	V	V	V	V
			BKPPD		V	V		V
			BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	BADAN KEPEGAWAIAN, PENIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH							
1	KEPALA BADAN	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Badan	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan	Asisten terkait	V			V	V
		pengoorBadanian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan	Asisten terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidangnya	Asisten terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan	Inspektorat		V	V		V
			Asisten terkait	V			V	V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan	BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
2	SEKRETARIS BADAN	penyiapan bahan penyusunan rencana kerja	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional kesekretariatan, ketatausahaan dan kepegawaian	Asisten terkait	V			V	V
		pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan Badan	BP4D		V	V		V
		pengoordinasian penyelenggaraan tugas Badan	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Badan	Asisten terkait	V			V	V
		pengoorBadanian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Badan	Asisten terkait	V			V	V
			BP4D		V	V		V
		pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum	Asisten terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
		pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan	Asisten terkait	V		V	V	V
3	BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN APARATUR SIPIL NEGARA	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	Asisten terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidangnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara	Asisten terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
4	BIDANG PENDIDIKAN., PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KARIER	penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier	BP4D		V	V		V
		penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier	Asisten terkait	V		V	V	V
		pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier	Asisten terkait	V	V	V	V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK							
1	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Perumusan kebijakan umum program kerja	BP4D		V	V		V
		pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis operasional dan fungsional tugas-tugas Kantor	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kantor dan unit kerja lain di bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup Bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Kantor	Inspektorat		V	V		V
		penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri	BP4D		V	V		V
			Asisten Terkait	V			V	V
			Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas Kantor	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
	BP4D			V	V		V	
	BKPPD			V	V		V	

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	KANTOR PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN							
1	Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Perumusan kebijakan umum program kerja	BP4D		V	V		V
		pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis operasional dan fungsional tugas-tugas Kantor	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoordinasian pelaksanaan kegiatan Kantor dan unit kerja lain di bidang tugasnya	Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pemfasilitasian dalam lingkup Bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Kantor	Inspektorat		V	V		V
		penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah bidang penanggulangan bencana	BP4D		V	V		V
			Asisten Terkait	V			V	V
			Perangkat Daerah Terkait		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas Kantor	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
	BP4D			V	V		V	
	BKPPD			V	V		V	

NO	PERANGKAT DAERAH	FUNGSI	INSTANSI TERKAIT	JENIS HUBUNGAN KERJA				
				KONSULTATIF	KOLEGIAL	FUNGSIONAL	STRUKTURAL	KOORDINATIF
1	2		4	5	6	7	8	9
	KECAMATAN							
1	CAMAT	perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program, dan kegiatan Kecamatan	BP4D		V	V		V
		perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kecamatan	Asisten Terkait	V			V	V
		pengoorkamatanian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan	Asisten Terkait	V			V	V
		pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya	Asisten Terkait	V			V	V
		pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan	Inspektorat		V	V		V
		pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan	Asisten Terkait	V			V	V
			BKD		V	V		V
			BP4D		V	V		V
			BKPPD		V	V		V

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 DAN HAK ASASI MANUSIA



CHANDRA BIMA PRAMANA, SH., MM.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19621001 199703 1 003